



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
SINGKATAN.....	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Hukum Laut Internasional	16
2. Wilayah Luar Yurisdiksi Nasional (ABNJ)	21
3. Prinsip Pencemar Membayar	22
4. Prinsip Kebebasan di Laut bebas	23
B. Landasan Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	26
2. Bahan Penelitian	26
3. Teknik Pengumpulan Data	28
4. Jalannya Penelitian.....	28
5. Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
1. Pengaturan Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>) dalam Rezim Hukum Laut bebas	31
a. Pengaturan tentang prinsip pencemar membayar di Area	31



b. Pengaturan tentang prinsip pencemar membayar di Laut bebas	39
2. Kemungkinan Penerapan Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>) dalam Rezim Hukum <i>Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction</i>	58
a. Pengaturan prinsip pencemar membayar dalam naskah ILBI	58
b. Kemungkinan penerapan prinsip pencemar membayar dalam rezim hukum <i>Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction</i>	71
3. Dampak Pengaturan Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>) dalam Naskah ILBI terhadap rezim hukum <i>Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction</i>	90
a. Pertanggungjawaban negara dalam penerapan prinsip pencemar membayar harus dipertegas	91
b. Risiko Perselisihan yang mungkin timbul karena perbedaan pandangan antarnegara	95
c. Perdebatan terkait substansi dari prinsip pencemar membayar itu sendiri	103
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122